

Penanganan Terorisme Sebatas Permukaan



ICHSAN MUTAQIN/HARIAN BERNAS

BANTUL -- Proses penanganan terorisme dan paham radikalisme di Indonesia selama ini dianggap masih berada pada tataran permukaan. Sementara hulu permasalahan sebenarnya, yakni masalah kesejahteraan dan kesempatan sosial, belum bisa diselesaikan di negeri ini.

Hal itu mengemuka dalam dialog pencegahan paham radikal terorisme dan ISIS yang merupakan kerjasama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pengurus Pusat Muhammadiyah di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (28/7).

Dalam dialog tersebut, para narasumber yakni mantan ketua PP Muhammadiyah Safi'i Ma'arif, Kepala Deputy 1 bidang pencegahan, penanggulangan dan deradikalisasi BNPT Mayor TNI Abdul Rahman Kadir, Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (Sekjen PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti dan Dosen UIN Sunan Kaligaja Prof Munir Mulkan memiliki persamaan pandangan bahwa salah satu faktor utama munculnya paham radikalisme yang mengatasnamakan agama Islam adalah adanya ketidakpuasan terhadap negara dengan dasar negara Pancasila yang dianggap gagal menjawab masalah kesejahteraan bangsa.

Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti saat membuka acara dialog mengatakan, karena adanya anggapan bahwa Pancasila sebagai dasar negara telah gagal dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, lalu muncul ide-ide membangun kedaulatan negara berdaulat Islam. Selanjutnya, ide-ide ini bergabung dan muncul kelompok-kelompok yang berupaya merealisasikan dengan cara-caranya sendiri yang cenderung radikal dan menyebar terorisme.

Hal ini tak lepas pula dari pemahaman yang sempit mengenai ajaran agama dari orang-orang yang akhirnya tergabung dalam kelompok radikal ini. Bahkan, hal ini justru berbalik mengancam agama.

"Belakangan ini yang muncul adalah ide-ide tentang Khilafah atau negara Islam di Indonesia. Terdapat 3 aspek yang mendukung pemikiran ini. Pertama kecenderungan pemahaman hanya dari pemahaman sempit

inihlah yang digunakan oleh kaum radikal guna merekrut anggota," katanya.

Dengan jalur dunia maya ini, maka tak heran jika kini generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terdaktinisasi paham terorisme dan radikalisme. "Terorisme seakan tidak pernah mati. Dinamika terorisme di Indonesia selalu mengalami perubahan pola yang dinamis baik dalam bentuk modus, pola propaganda, rekrutmen maupun jaringannya. Hal yang paling berbahaya yaitu paham dan ideologinya yang mampu mengubah pandangan dan pola pikir masyarakat. Dan itu dilakukan melalui website sosial media yang saat ini telah ada ribuan website hasil pola pikir radikal," tambahnya.

Hal ini dipertegas oleh Prof Buya Syafii Ma'arif. Menurutnya, dinamika terorisme di Indonesia selalu mengalami regenerasi yang seakan tidak pernah habis. Pelaku jaringan terorisme saat ini pun juga masih mencari sasaran, bahkan banyak yang menargetkan pemuda atau pelajar yang masih berusia belasan tahun.

Sebab usia muda masih rentan terhadap doktrin terkait konsep jihad yang justru mencederai bangsa sendiri. Karena itulah saat ini jaringan kelompok terorisme cenderung memilih anak muda sebagai sasarannya. Saat ini jaringan terorisme dalam memasukkan paham radikalismenya, mereka menggaet para anak muda untuk dipengaruhinya. Kondisi anak muda yang mudah dicuci otaknya, memberikan kemudahan kelompok terorisme untuk meregenerasi kelompoknya. Namun kemudahan itu sebenarnya tidak terlepas dari pemahaman agama generasi muda yang minim.

"Berbicara mengenai terorisme, mereka melakukan tindakan dengan cara kekerasan, kebijakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kondisi anak muda yang dengan mudahnya dicuci otak, ini disebabkan karena lemahnya pemahaman agama. Sehingga anak muda yang sedang mencari identitas tersebut akan mudah mengikuti apa yang dikatakan oleh para kelompok terorisme tersebut. Agama sudah tidak berfungsi lagi padahal Islam adalah agama keberadaban bukan agama kebiadaban," paparnya. (qin)

KESEPAKATAN -- Para perwakilan BNPT, PP Muhammadiyah, Poldadiy dan sejumlah elemen menandatangani kesepakatan penanggulangan dan pencegahan radikalisme dan terorisme di Sportorium UMY, Kamis (28/7) kemarin.

Menurutnya, kelompok-elompok radikal ini umumnya memimpikan terbentuknya negeri datuissalam yaitu negeri yang aman damai sejahtera. "Dan mereka meyakini hanya ketika kekuasaan islam efektif, maka tujuan itu bisa tercapai. Dan kekuasaan Islam hanya bisa tercapai jika pemimpin-pemimpin negara adalah orang Islam dan harus orang Islam yang bisa mereka percaya. Yaitu orang Islam yang sama keyakinan dengan mereka. Hal ini mutlak, dan mereka tidak akan membuka diri untuk berdiskusi," ujarnya.

Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir selaku Deputy Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengatakan bahwa para terorisme dalam melakukan aksi-aksinya mereka juga memanfaatkan dunia maya. "Mereka sangat pandai memanfaatkan dunia maya untuk mendapatkan anggota. Isi website diselingi tulisan-tulisan yang mengacu pada konten-konten radikal. Apalagi saat ini masyarakat yang ingin tau tentang agama mereka lebih memilih untuk mencari via internet tanpa konfirmasi ulang kepada ulama maupun ustaz yang faham agama. Kondisi

dari teks-teks agama. Kedua, adanya pengaruh lingkungan, serta munculnya mimpi untuk membersihkan kerusakan moral lingkungan dengan pemurnian akidah. Dan Muhammadiyah secara tegas menolak paham Khilafah ini setelah berakhimya periode Khulafatusyidin (4 khalifah pertama dalam sejarah Islam, red)," jelasnya.

Prof Buya Safi'i Ma'arif bahkan menyebut tindak radikalisme dan terorisme di Indonesia sebagai bencana bagi Islam di Negeri Islam. Terlebih pemerintah sejak proklamasi seakan tidak memperhatikan masalah keadilan. Hal itu membuat ideologi yang datang dari luar bisa masuk begitu mudah, termasuk paham radikalisme tentang jihad.

"Pendekatan keamanan (militer) dalam memerangi radikalisme dan terorisme ini tidak akan menyelesaikan masalah. Pendekatannya harus multi disiplin dan menyangkut hulu permasalahannya, yakni masalah keadilan dan kesempatan sosial," ujarnya.

Hal senada disampaikan Dosen UIN Sunan Kaligaja, Prof Munir Mulkan.